BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 merupakan kebijakan strategis yang diambil pemerintah guna mengoptimalkan penerimaan negara serta memperkuat landasan fiskal. Akan tetapi, kebijakan ini berdampak besar pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Penelitian tentang dampak peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap tingkat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN menunjukkan adanya pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku kepatuhan pajak. Sebelum tarif dinaikkan (2022-2024), kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN WPOP sangat tinggi mencapai 100% setiap tahun, yang menandakan system administrasi perpajakan yang sangat baik dan sosialisasi yang sangat berhasil mendorong kepatuhan penuh dari wajib pajak individu. Namun, setelah tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025, terutama untuk barang mewah, terjadi penurunan tajam jumlah WPOP yang melaporkan SPT Masa PPN, dari 10 orang menjadi 1 orang yang secara teratur melaporkan transaksi barang mewah. Meski begitu, Tingkat kepatuhan pelaporan dari WPOP yang masih melaporkan tetap 100%. Penurunan ini disebabkan oleh kompleksitas administrasi akibat perubahan system, kurangnya informasi dan Pendidikan, serta peningkatan beban ekonomi setelah kenaikan tarif. Kebijakan penghapusan saksi administrasi selama masa peralihan juga tidak sepenuhnya efektif mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak yang sebelumnya kurang patuh. Nilai transaksi barang biasa relatif stabil, sementara nilai transaksi barang mewah yang dilaporkan WPOP aktif berkisar antara Rp69 juta sampai Rp75 juta per bulan di awal 2025, dengan total PPN yang harus dibayar dari Januari hingga April sebesar Rp33,63 juta. Kebijakan PPN 12% untuk barang mewah terbukti meningkatkan penerimaan pajak dari kelompok tertentu, tetapi belum berhasil memperluas cakupan pelaporan WPOP secara signifikan. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi kemudahan administrasi, sosialisasi, beban ekonomi, dan efektivitas penghapusan sanksi.

5.2 Saran

Sebagai rekomendasi, Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada WPOP mengenai perubahan tarif dan prosedur pelaporan, terutama selama masa transisi kebijakan. Peningkatan kualitas layanan perpajakan, baik secara luring maupun daring, perlu menjadi prioritas untuk mengurangi kesulitan administrasi yang dapat menurunkan kepatuhan. Selain itu, dilakukan penilain secara rutin mengenai pengaruh peningkatan tarif PPN, terutama pada usaha mikro dan kecil, penting dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi penurunan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN. Penghapusan sanksi administrasi perlu disertai dengan pengawasan dan pendampingan yang lebih ketat untuk menjaga kesadaran wajib pajak akan pentingnya pelaporan tepat waktu. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mempertimbangkan aspek psikologis dan social yang memengaruhi kepatuhan serta memperluas jumlah responden agar hasil penelitian lebih komprehensif dan menjadi dasar perumusan kebijakan perpajakan nasional yang lebih efektif dan adil.